

**SEKOLAH TIONG HOA HWEE KWAN (STHHK) SEBAGAI
REPRESENTASI PENDIDIKAN MODERN ETNIS TIONGHOA DI
BATAVIA TAHUN 1901-1942**

Ayu Putri Nabila

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
sayaayunabila@gmail.com

Abstrak

Fokus utama dari penelitian ini bertujuan memaparkan proses berdirinya lembaga pendidikan modern pertama etnis Tionghoa di Batavia, yakni Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK), serta mengungkap pelbagai alasan dan faktor yang menjadi pertimbangan pendirian STHHK selama masa pemerintahan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yakni heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak abad ke-19, nasib kalangan Tionghoa di Batavia begitu dibatasi oleh kebijakan-kebijakan rasial pemerintah Belanda, salah satunya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, STHHK muncul sebagai representasi pendidikan modern etnis Tionghoa yang didirikan secara independen oleh kalangan Tionghoa. Selama perkembangannya, sekolah turut dipengaruhi oleh keadaan masyarakat mau pun sistem pemerintahan yang ada di Batavia.

Kata Kunci: Sekolah, Batavia, Tiong Hoa Hwee Kwan

Abstract

The main focus of this study is to describe the process of the first Modern Chinese Education in Batavia, the Tiong Hoa Hwee Kwan School. Additionally, the study will reveal the various factors behind STHHK's establishing during the Dutch Government. This study uses the critical history method which consists of four methods, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results indicate that since the 19th century, the life of the Chinese people has been severely restricted by the various racial policies of the Dutch government. Therefore, STHHK emerged as a representation of modern Chinese education in the Dutch East Indies. Throughout its growth, school has been influenced by the conditions of the people and the systems of government in Batavia.

Keywords: School, Batavia, Tiong Hoa Hwee Kwan

PENDAHULUAN

Pada abad ke-20, keberadaan sekolah etnisitas menjadi salah satu model pendidikan populer di kalangan masyarakat Hindia Belanda, khususnya model pendidikan modern. Kancah pendidikan modern berbasis etnisitas ini terutama paling mencolok di Batavia sebagai pusat sebagian besar lembaga pendidikan menengah dan tinggi di koloni. Hal ini kelak menjadi salah satu pemicu keinginan orang-orang Tionghoa di Batavia untuk mendirikan perkumpulan Tionghoa berpikiran maju dan intelektual. Di samping dikarenakan faktor budaya, perkembangan akan pemikiran tersebut menjadi salah satu dampak dari kebijakan politik etis dalam bidang pendidikan pada tahun 1901-1930.

Kaum muda Hindia Belanda yang telah mengadopsi pemikiran-pemikiran modern mulai menggunakan cara-cara dan teknik organisasi modern dalam berpolitik (Muhammad Umar Stadat Hasibuan, 2008: 14). Hal ini terus menjadi akar kekuatan perkembangan nasionalisme keindonesiaan, termasuk nasionalisme orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah hanya untuk bangsa Belanda dan kalangan elit bumiputera, sedangkan anak-anak Tionghoa yang ingin masuk dikenakan banyak syarat yang sulit dipenuhi. Keadaan semakin diperparah dengan kebiasaan buruk masyarakat Tionghoa dalam pemborosan uang untuk pesta perkawinan dan kematian yang penuh tahayul.

Sebagai gebrakan awal, pada tahun 1900 kalangan Tionghoa muda atau tua berpikiran maju membentuk gerakan “Kaum Muda” atau “*Jong Chinese Beweging*”. Mereka memiliki keinginan untuk menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme Tiongkok di kalangan penduduk Tionghoa di Hindia Belanda, terutama Batavia sebagai pusat koloni (Benny G. Setiono, 2008: 304). Pada 17 Maret 1900, mereka mendirikan sebuah perkumpulan khusus orang-orang Tionghoa pada sebuah pertemuan di rumah Phoa Keng Hek di Jl. Mangga Besar.

Perkumpulan tersebut diberi nama Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK, 中华会馆/*Zhong Hua Hui Guan*) seterusnya akan menggunakan PTHHK.¹

Namun barulah pada 3 Juni 1900, Gubernur Jendral Hindia Belanda memberikan pengesahan terhadap PTHHK melalui maklumat dalam sebuah surat kabar *Javasche Courant* pada 8 Juni 1900 (Kristan dan Sugiaman Gonassis, 2020:14). PTHHK sendiri memiliki makna *Chinese Club* atau Rumah Perkumpulan Tionghoa yang didirikan oleh 20 orang kaum terpelajar kalangan Tionghoa di Hindia Belanda. Tujuan awal didirikannya PTHHK ialah ingin mereformasi adat buruk masyarakat Tionghoa melalui ajaran konfusius (agama Konghucu) sebagai tujuan pokok resinasi (mentionghoakan kembali), mendirikan sistem pendidikan modern, dan ingin mengangkat kedudukan masyarakat Tionghoa di mata masyarakat Hindia Belanda (Anonim, 2011: 14).

Seiring berjalannya waktu, PTHHK mulai memusatkan perhatiannya kepada situasi pendidikan masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda yang semakin tertinggal. Pada 17 Maret 1901, PTHHK mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa bernama Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) di Jl. Patekoan No. 31 (kini Jl. Perniagaan, Jakarta Barat), dan menjadi sekolah swasta modern pertama anak-anak Tionghoa di Hindia Belanda (Noer Isnaeni, tt: 3-4). Pasca satu tahun STHHK berdiri, ratusan sekolah Tionghoa yang mengikuti manajemen STHHK turut bermunculan di permukaan, termasuk semakin meluasnya keberadaan STHHK di berbagai daerah. Situasi ini berhasil menimbulkan kekhawatiran pemerintah kolonial, yang takut kehilangan kendali atas masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda dan khawatir jika lulusan STHHK memiliki pandangan politik yang berkiblat ke Tiongkok, bukan ke Hindia Belanda sebagai kawula Belanda.

Sebagai upaya mengatasi kekhawatiran tersebut pemerintah Hindia-Belanda membuka sekolah khusus anak-anak Tionghoa bernama *Holandsch Chineesche School* (HCS) pada tahun 1908 di Batavia, dan berkembang ke daerah-daerah lain. HCS didirikan atas pertimbangan Menteri Urusan Tanah Jajahan Belanda yang

¹Penulis menggunakan PTHHK dan STHHK untuk memudahkan pembaca dalam membedakan penyebutan Perkumpulan THHK dengan Sekolah THHK.

bernama D. Vock (Noer Isnaeni, tt: 3-4). Seiring berjalannya waktu keberadaan HCS mulai mengganggu perkembangan STHHK, dan menyebabkan masyarakat Tionghoa terpecah menjadi dua golongan: mereka yang berpendidikan Belanda dan berpendidikan Tionghoa (Benny G. Setiono, 2008: 314).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah menurut Kuntowijoyo ialah petunjuk pelaksana dan teknis tentang bahan, kritik, dan interpretasi sejarah serta penyajian dalam bentuk tulisan (Abd Rahman Hamid, 2015: 42). Untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau, metode penelitian sejarah memiliki empat tahapan pokok yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Metode *pertama*, Heuristik, yakni tahap pencaharian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah relevan dengan penelitian yang akan ditulis. *Kedua*, verifikasi (kritik sumber), yakni pengkajian terhadap autentisitas dan kredibilitas sumber dari segi fisik mau pun segi isi sumber. Autentisitas bagain dari kritik eksternal, yakni melihat keaslian sumber dari segi fisik seperti jenis kertas, warna kertas, ejaan yang digunakan, dan lain-lain. Sementara kredibilitas bagian dari kritik internal, yakni menganalisa keaslian sumber dari segi isi. *Ketiga*, Interpretasi, yakni mengelola hubungan antar fakta-fakta sejarah yang telah diuji kebenarannya. *Keempat*, Historiografi merupakan fase akhir dalam metode sejarah yang harus dilakukan oleh sejarawan agar penelitiannya menjadi sebuah karya ilmiah yang utuh. Menurut Dudung Abdurrahman, penulisan sejarah (historiografi) merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil dari penelitian sejarah yang telah dilakukan (Dien Madjid, 2014: 231).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Tionghoa di Batavia Sebelum Abad Ke-20

Pada abad ke-18, VOC menarik orang-orang Tionghoa yang berada di Banten ke kota Batavia dengan suatu janji ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh kalangan Tionghoa dari kota dagang tersebut. Potensi perekonomian

yang melimpah dan lekatnya kalangan Tionghoa dalam mengelola perekonomian mendatangkan banyak keuntungan besar untuk kehidupan mereka di Batavia. Sebagian besar kalangan Tionghoa yang masuk ke Batavia bekerja pada pabrik-pabrik gula. Pabrik-pabrik gula tersebut umumnya dimiliki oleh para pengusaha Tionghoa kaya. Pada tahun 1710 terdapat 130 puluh pabrik gula milik 84 pengusaha, di mana 79 di antaranya adalah para pengusaha Tionghoa. Lambat laun kehadiran mereka bukan sekadar penghuni kota tetapi sebagai saingan VOC (Rirn Darini, Vol 7, No. 1, 2009: 3-4)

Melihat situasi ini, VOC segera memberlakukan kebijakan izin tinggal terhadap masyarakat Tionghoa di Batavia. Surat izin yang diberlakukan oleh VOC begitu beragam. Pada 10 Juni 1727, kebijakan *Permissie briefe* (surat izin tinggal) bagi mereka yang telah bertempat tinggal di Batavia lebih dari 10 tahun mulai diberlakukan. Sementara pada tanggal 12 Juni 1727, kebijakan izin tinggal dokumen lisensi (*licentie briefje*) bagi masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal tiga bulan untuk urusan niaga, dengan membayar dua *rijksdaalders* mulai diterapkan (Fokky Faud, Vol. 12, No. 2, 2013: 33). Tidak hanya itu, bersama dengan masyarakat bumiputera VOC menempatkan penduduk Tionghoa di luar kawasan tembok Kota Batavia, yang disebut Ommelanden. Sementara, orang Eropa diwajibkan tinggal di dalam tembok kota.

Untuk lebih menghambat gerak Tionghoa, aturan rasial tersebut semakin disempurnakan melalui kebijakan Pas Jalan (*Passenstelsel*)² pada tahun 1816 dan Sistem Pemukiman (*Wijkenstelsel*) pada tahun 1866 (Fokky Faud, Vol. 12, No. 2, 2013: 33).³ Dalam kebijakan Sistem Pemukiman orang-orang Tionghoa dipaksa menetap pada konsentrasi pemukiman yang disebut Kampung Pecinan. Dalam bidang ekonomi pemerintah kolonial menempatkan kalangan Tionghoa dalam posisi dominan. Mereka dimanfaatkan sebagai perantara minoritas (*middlemen*

² Kebijakan izin perjalanan (*Passenstelsel*) yang tertuang dalam *permissive briefe* atau surat jalan dijual seharga 0,5 f. sampai 1 f. dan isinya begitu rinci: menyangkut tentang tujuan, siapa yang dituju, maksud bepergian, berapa lama, jenis kendaraan, siapa yang menyertai, dsb.

³Aturan *Wijkenstelsel* dilanjutkan oleh pemerintah kolonial dari ke waktu pada tahun 1835, 1854, 1866, dan 1871.

minority) ekonomi atau biasa disebut sebagai pedagang perantara antara pihak Belanda dengan masyarakat Bumiputera. Orang-orang Tionghoa dinilai sebagai mediator yang menjanjikan untuk posisi tersebut, maka Belanda menjual berbagai macam hak pengelolaan atas jalan tol, candu, rumah gadai, kepada orang Tionghoa.

Dengan adanya dukungan dari penguasa, para penyewa tersebut dikesankan oleh pemerintah kolonial sebagai pihak yang kerap memeras rakyat dan menjadi sangat kaya karena kedudukannya. Situasi tersebut menempatkan kalangan Tionghoa sebagai minoritas perantara yang kuat secara ekonomi, tetapi lemah secara politis. Posisi kalangan Tionghoa seperti itu memang telah direncanakan sedemikian rupa untuk menempatkan mereka sebagai pion atau fokus permusuhan bagi pemerintah kolonial maupun masyarakat Bumiputera. Posisi kalangan Tionghoa sebagai perantara turut tercermin dalam kebijakan *Cultuurstelsel* (Sistem Taman Paksa) pada industri gula. Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa sebagian besar pabrik-pabrik gula di Batavia milik pengusaha Tionghoa, maka orang-orang Tionghoa banyak dilibatkan dalam hal pengelolaan tebu menjadi gula sebagai wakil pihak swasta berdasarkan kontrak dari pemerintah. Belanda menggunakan orang-orang Tionghoa untuk melancarkan roda eksploitasi melalui peran mereka sebagai perantara dan pengawas (Yudi Prasetyo, FX. Wartoyo, 2015: 75-76; Ririn Darini, Vol 7, No. 1, 2009: 4-5).

Sementara dalam bidang pendidikan, pemerintah Belanda menyelenggarakan nya berdasarkan garis warna dan diskriminasi. Prinsip ini dibedakan berdasarkan stratifikasi sosial buatan pemerintah Belanda yaitu dimulai dari golongan Eropa, golongan Timur Asing (Tionghoa, India, dan Arab), dan golongan Bumiputera. Sulitnya pendidikan yang didapat membuat orang-orang Tionghoa mulai menangani sendiri masalah pendidikan anak-anak mereka.

Pada sekitar tahun 1787, di Petak Sembilan, Batavia, terlacak pernah didirikan pusat pendidikan tradisional “Gie Oh” artinya “sekolah gratis”, yang ditujukan bagi anak-anak miskin. Guru-guru yang mengajar banyak didatangkan dari Cina dan dipilih hanya karena mengetahui lebih banyak mengenai kesusastraan Cina. Murid-murid di sekolah “Gie Oh” hanya mempelajari, membaca, serta menulis buku Tionghoa klasik. Tingkat tertinggi yang dapat dicapai adalah menulis

karangan secara klasik. Dalam pengucapan kata juga diambil dari buku-buku klasik. Sang murid akan dipanggil ke depan untuk menyebutkan sebuah kata dalam buku klasik tersebut. Meskipun tak mengenal artinya, tetapi akan dipandang cukup apabila sang murid dapat mengucapannya dengan sempurna. Oleh karenanya, yang menjadi fokus utama para murid bukanlah arti dari kata tersebut, melainkan cara pengucapannya. Belajar menulis juga melalui hal yang sama, para murid diharuskan menjiplak tulisan Tionghoa tanpa mengetahui artinya (Onghokham, 2009: 72-73). Sebenarnya ada beberapa anak Tionghoa yang beruntung dapat bersekolah di sekolah-sekolah zending atau beberapa sekolah Belanda lainnya. Akan tetapi, para murid dikenakan biaya sekolah sangat mahal dan harus ada rekomendasi dari pejabat Belanda, seperti Residen atau asisten Residen.

Konsep stratifikasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan memunculkan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa sebagai golongan Timur Asing. Pada perkembangan selanjutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu pemicu kalangan Tionghoa untuk semakin mengembangkan nasionalismenya. Nasionalisme Tionghoa ditandai dengan lahirnya sebuah Perkumpulan *Tiong Hoa Hwee Kwan* (PTHHK), yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa berpendidikan Barat pada 17 Maret 1900 di Batavia.

Munculnya PTHHK ini diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor terbesar disebabkan adanya keinginan mereformasi budaya kalangan Tionghoa, beberapa diantaranya budaya candu, perjudian, dan kebiasaan buruk menghamburkan uang untuk melakukan upacara perkawinan dan kematian. Para tokoh masyarakat Tionghoa tidak terlalu senang dengan budaya yang mereka anggap terbelakang, berbahaya serta bertentangan dengan ajaran Konfusius. Di samping itu, berbagai kebijakan pemerintah Belanda terhadap masyarakat Tionghoa turut menimbulkan semangat nasionalisme kalangan Tionghoa yang tergabung dalam PTHHK di Batavia.

Seiring berjalannya waktu, PTHHK turut memusatkan perhatiannya terhadap pendidikan modern untuk anak-anak, maka didirikanlah Sekolah Tionghoa Sekolah Tionghoa Hwee Kwan (STHHK) pada 17 Maret 1901 di Jl. Patekoan (saat ini Jl. Perniagaan), Batavia. STHHK di Batavia menjadi sekolah

modern pertama etnis Tionghoa di Hindia Belanda.

B. Perkembangan Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) di Batavia Tahun 1901-1942

Pada masa awal berdirinya STHHK di Batavia, bahasa Belanda masuk dalam mata pelajaran bahasa asing. Namun, dikarenakan biaya mempekerjakan guru bahasa Belanda begitu mahal, maka disepakati untuk mengganti guru bahasa Belanda dengan bahasa Inggris. Guru-guru Tionghoa yang tinggal di Singapura dan fasih berbahasa Inggris pun mulai di datangkan ke Batavia. Selain itu, para pemimpin PTHHK merasa bahasa Inggris jauh lebih berguna karena telah menjadi bahasa komersial Asia Timur (Yudi Prasetyo, FX. Wartoyo, 2015: 105).⁴ Sementara untuk buku pelajaran dan materi ajar STHHK diambil dari buku pelajaran serta materi yang digunakan di sekolah dasar modern di Jepang. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kegiatan pendidikan tidak lagi menggunakan bahasa Hokkien melainkan bahasa Mandarin.

Sistem modern yang digunakan oleh PTHHK untuk kurikulum STHHK di Batavia disebut sebagai sistem "*practisch*", yakni tidak adanya lagi sistem menghapalkan kitab-kitab tradisional Tiongkok seperti sistem sekolah tradisional melainkan murid-murid diberikan buku-buku bacaan yang dapat dimengerti dan relevan dengan situasi pendidikan modern saat itu (Kwee Tek Hoay, No. IV, Moestika Romans, Januari 1937).

Pelajaran- pelajaran yang diberikan di STHHK berupa ilmu pengetahuan modern yaitu meliputi pelajaran berhitung, geografi, sejarah, ilmu alam, membaca, menulis, dan tak terkecuali pelajaran tentang Konfusianisme dan bahasa *Tjing-Im* (bahasa Mandarin). Untuk masalah biaya pendidikan terbagi menjadi dua, para orang tua murid yang tergolong menengah ke bawah ditetapkan sebesar f 1 hingga f 10, sedangkan anak-anak Tionghoa kaya dikenakan tarif lebih tinggi.

⁴Pada perkembangan selanjutnya, ketertarikan dan kemampuan kalangan Tionghoa terhadap bahasa Inggris menimbulkan urusan urgensi potensial terburuk bagi pemerintah kolonial. Kelompok elite Tionghoa tertentu, terutama kelompok elite pengusaha yang memiliki jaringan bisnis di Singapura, telah memiliki akses informasi global dengan dunia luar melalui kemampuan berbahasa Inggris

Pada perkembangannya, tepatnya 1 September 1901 PTHHK berhasil membuka sekolah berbahasa Inggris yang diberi nama *Yale Institut* atau *Afdeeling C Tiong Hoa Hwe Kwan*. Manajemen sekolah ini terpisah dari sekolah yang berbahasa Tionghoa. Pada tahun 1904, murid-murid dari Sekolah Gie Oh dipindahkan ke STHHK di Batavia dan Sekolah Gie Oh resmi ditutup.

Pasca lima tahun berdiri, STHHK sudah memiliki sebanyak 75 STHHK di berbagai daerah dengan total 5.500 murid. Semua sekolah tersebut berorientasi ke negeri Tiongkok, sehingga memunculkan kesadaran nasional Tiongkok yang bangkit pasca revolusi nasional di tanah air mereka. Pada perkembangan selanjutnya STHHK di Batavia disebut PA HOA (Patekoan Tionghoa), guna membedakannya dengan STHHK di daerah lain (Irene Hiraswanti Gayatri, dkk, 2019: 65-66).

Munculnya sekolah modern pertama Tionghoa di Hindia Belanda melalui STHHK tidak hanya menarik perhatian masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda, melainkan turut mempengaruhi pemerintah Tiongkok. Pejabat-pejabat Tiongkok dikirim ke Hindia Belanda untuk meninjau sekolah-sekolah Tionghoa yang ada di Hindia Belanda, serta memberikan beasiswa kepada murid-murid berprestasi untuk melanjutkan studinya ke Tiongkok, salah satunya murid-murid STHHK di Batavia.

Melalui salah satu surat kabar Tionghoa di Hindia Belanda, STHHK di Batavia memberitakan kepada seluruh STHHK di Hindia Belanda mengenai murid-murid yang terpilih berangkat ke Nang King (sekarang Nanjing) pada 25 Januari 1907, untuk melanjutkan studinya. Dalam surat kabar tersebut juga diberitahukan bahwa murid-murid yang melanjutkan studinya ke Tiongkok telah berkoordinasi dan mencapai kesepakatan dengan orang tua masing-masing. Keberangkatan ini begitu disambut antusias oleh kalangan Tionghoa di Hindia Belanda, salah satunya kalangan elite Tionghoa. Para saudagar minyak dan bangsawan Tionghoa di Hindia Belanda turut menyumbangkan uang untuk menyediakan pakaian-pakaian baru yang akan dikenakan para murid selama belajar di Tiongkok (Lim Khim Siang, *Ik Po*, No.150/3, 22 Januari 1907: 3). Pada tahun 1908, rombongan kedua yang terdiri dari 10 orang siswa di bawah wakil ketua *Nio Hoey Oen* diberangkatkan ke Jinan, Tiongkok, untuk tujuan yang sama. Setahun setelahnya pada bulan April, STHHK

di Batavia menyelenggarakan ujian akhir sekolah rendah (SD) bersama, yang diikuti oleh siswa sekolah rendah dari Lung Hoa (THHK Bandung), Mau Hoa (THHK Bogor), Shi Hoa (THHK Serang), Dan Ya Hoa (THHK Garut), dll.

Berbeda dengan pemerintah Tiongkok, perkembangan PTHHK mau pun STHHK membuat pemerintah kolonial khawatir akan kemunculan rasa nasionalisme yang semakin mendalam dan berujung pada sebuah gerakan sosial, terlebih STHHK yang berkiblat ke Tiongkok. Sebagai upaya mengatasinya, maka pemerintah kolonial mendirikan *Hollandsche Chinese School* (HCS) sebagai sekolah saingan STHHK pada tahun 1908 di Batavia.

Seiring berjalannya waktu berdirinya HCS berhasil memecah kalangan Tionghoa menjadi dua golongan: kubu STHHK dan kubu yang mengagungkan sekolah-sekolah Belanda. Melihat kemerosotan STHHK pasca didirikannya HCS di Batavia, para pemimpin PTHHK mencoba memperbaiki kekurangan dalam sistem pendidikan mereka melalui *Djawa Hak Boe Tjong Hwee*. Himpunan ini memiliki fungsi utama untuk mengawasi pengelolaan sekolah dan menyediakan guru-guru berkualitas dari Tiongkok. Pada tahun 1913, PTHHK Batavia berusaha membuka sekolah menengah pertama dengan nama *Tiong Hoa Hwe Koan Tiong Hak Tong* untuk STHHK di Batavia, tetapi pada 1 Maret 1915, sekolah menengah itu ditutup karena kekurangan siswa. Kemudian sebagai pengganti sekolah menengah, tingkat siswa di sekolah dasar atau sekolah rendah secara berangsur-angsur ditambah satu tingkat demi satu tingkat (Anonim, 2011: 75).⁵

Merosotnya minat siswa untuk masuk ke STHHK di Batavia turut pula mempengaruhi STHHK di luar Batavia. Pada tahun 1919, *Kauw Yok Hwee* menyarankan PTHHK agar kurikulum STHHK disesuaikan dengan keadaan masyarakat, tetapi usaha perbaikan itu gagal karena kekurangan dana. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak besar untuk kalangan Tionghoa di Batavia dalam menyikapi STHHK. Orang-orang Tionghoa peranakan dan Totok di Batavia banyak yang mendirikan sekolah-sekolah swasta Tionghoa dengan sistem

⁵Pada tahun 1923, para siswa di sekolah Pa Hoa telah belajar hingga tingkat kesepuluh. Secara tidak terpisah, pada saat itu, sebenarnya THHK Jakarta telah memiliki SMP di samping SD.

serta kurikulum sekolah Belanda secara sembunyi-sembunyi. Meskipun begitu, para murid STHHK di Batavia (PA HOA) memiliki murid lebih banyak daripada HCS dan jumlah murid turut mempengaruhi jumlah guru yang ada. Mengenai rincian jumlah murid dan guru di STHHK di Batavia pada tahun 1901-1941, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Murid-murid STHHK di Batavia (PA HOA) pada Tahun 1901-1941

Tahun	Jumlah
1901	31
1911	557
1933	1.040
1937	1.062
1938	1.198
941	1.151

Sumber: Anonim, *Buku Peringatan 110 tahun Sekolah THHK - Pahoa Jakarta*, Jakarta: Perkumpulan Pancaran Hidup, 2011, hlm. 14-17.

Tabel 2
Jumlah serta gaji para guru STHHK di Batavia pada Tahun 1936-1942

Tahun	Jumlah Guru	Gaji Rata- rata (f)
1936	46	164.88
1937	37	134.98
1938	37	127.93
1939	68	118.--
1940	40	113.50
1941	38	116.--
1942	20	90.--

Sumber: Anonim, *Hari Ulang Tuhan ke-50 THHK Djakarta 1900-1950*, hlm. 43.

Kedua tabel di atas menunjukkan apabila jumlah murid berkurang, maka jumlah guru pun sama. Sejak berdirinya STHHK di Batavia pada tahun 1901-1938, penambahan jumlah murid terus mengalami peningkatan. Namun, pada kurun waktu 1933-1937, penambahan jumlah murid begitu minim. Begitu pun jumlah guru dari tahun 1936-1938 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 1937-1938 jumlahnya sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendirian sekolah HCS pada tahun 1908, yang menyebabkan banyaknya kalangan Tionghoa mulai mendaftarkan atau memindahkan anak-anak mereka ke HCS.

Situasi ini kemudian memaksa para pengurus PTHHK melakukan berbagai perbaikan kurikulum atau sistem pengajaran STHHK di Batavia pada tahun 1908-1927. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa HCS di Batavia berhasil memecah kalangan Tionghoa, maka pada tahun 1930-an, kalangan Tionghoa peranakan dan Totok di Batavia mendirikan sekolah-sekolah swasta Tionghoa dengan sistem dan kurikulum Belanda secara sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya, penambahan jumlah murid mau pun guru STHHK di Batavia pada tahun 1930an, tidaklah banyak.

Menjelang penyerangan tentara Jepang ke Asia Tenggara pada tahun 1941, STHHK di Batavia mengalami penurunan jumlah siswa dan guru. Setelah tentara Jepang berhasil memukul mundur kolonialisme Belanda dan mulai mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1942, seluruh STHHK di Batavia ditutup dan diubah menjadi markas internir untuk tawanan perang dan pos penjagaan (Yerry Wirawan, 2018:17). Namun, berkat kegigihan para pengurus PTHHK yang terus mendesak pemerintah Jepang, maka dalam kurun waktu 1942-1943 STHHK mendapat pinjaman gedung sekolah di Jalan Mangga Besar, Jalan Pinangasia, dan Jalan Ketapang.

Pada masa kependudukan militer Jepang, sekolah-sekolah Belanda dilarang beroperasi. Hanya sekolah-sekolah Tionghoa dan Indonesia saja yang diperbolehkan tetap berjalan. Pemerintah militer Jepang memasukkan orang-orang Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan ke dalam suatu wadah yang sama. Anak-anak Tionghoa Peranakan yang sebelumnya bersekolah di HCS atau ELS menerima pendidikannya di STHHK, sehingga terjadi semacam resinasi anak-anak Tionghoa

Peranakan.

Di luar huru-hara kegagalan perbaikan dan terpecahnya masyarakat Tionghoa menjadi dua golongan, STHHK pernah memiliki perpustakaan yang cukup maju pada masa pemerintahan Belanda. Sayangnya, tidak ada data yang menjelaskan kapan perpustakaan STHHK di Patekoan ini didirikan. Koleksi buku-buku diporeleh dari dua sumber, yakni dari lelangan di Hindia Belanda dan dibeli dari luar negeri, serta hasil sumbangan dari para dermawan atau simpatisan. Buku-buku yang disumbangkan berupa kumpulan buku-buku referensi seperti kamus, peta, ensiklopedia, serta kumpulan media berkala yang telah dijilid dalam bahasa Tionghoa dan Inggris. Sementara, koleksi hasil dari pembelian di luar negeri atau lelang para pengurus dapat menghabiskan uang hingga ratusan gulden pada saat itu. Uang yang digunakan untuk pembelian buku-buku ini tentu saja berasal dari anggaran khusus, dan telah disepakati oleh para pengurus. Hingga akhir tahun 1938, koleksi buku-buku di perpustakaan STHHK di Batavia tersebut mencapai 22.707 jilid dan belum termasuk 4.400 jilid majalah.

Pada saat itu, PTHHK dan STHHK menjadi satu-satunya sekolah dan perkumpulan yang memiliki koleksi sumber bacaan terbanyak. Pada saat tentara Jepang masuk ke Hindia Belanda, nasib buruk turut dialami oleh perpustakaan STHHK di Batavia, di mana terjadi pengrusakan buku besar-besaran. Pihak Jepang menggunakan kertas buku-buku klasik dari Tiongkok untuk dialihfungsikan sebagai tisu toilet, melinting rokok, bahkan banyak pula yang dijadikan sebagai alas tidur serta penggunaan lain yang tidak semestinya (Anonim, 2011: 67).

C. Dampak Perkembangan Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) di Batavia

Reformasi pendidikan yang dipelopori oleh PTHHK melalui pendirian STHHK di Batavia, dan menjamur di berbagai wilayah lain berhasil memberikan dampak dalam bidang sosial-politik serta budaya. Penduduk Tionghoa memaknai pendidikan tidak hanya sebatas mencerdaskan tetapi sebagai wadah persatuan dan alat aspirasi politik. Lambat laun eksistensinya mulai diperlihatkan melalui keterlibatannya dalam dunia pers. Memasuki dasawarsa abad ke-20, pertumbuhan

pers Tionghoa semakin menjamur seiring tumbuhnya nasionalisme dalam tubuh PTHHK dan STHHK. Satu hal yang penting dari sejumlah pers Tionghoa yang dimotori oleh THHK adalah kebanyakan dari penerbitan mereka menggunakan bahasa Melayu rendah, tapi dengan judul beraksara Tionghoa (Iyus Jayusman, Vol 4 No. 1, 2021: 55-56).

Apabila dilihat dari dimensi politis yang dipantulkan oleh surat kabar Tionghoa, setidaknya dapat dibagi dalam tiga aliran politik yakni: pertama, pers Tionghoa dengan orientasi nasionalis Tiongkok yang diwakili oleh Sin Po; kedua, pers Tionghoa dengan orientasi mendukung pergerakan nasional Indonesia yang diwakili oleh Sin Tit Po; dan ketiga, pers Tionghoa Siang Po yang menjadi bagian dari kelompok Chung Hwa Hui (CHH)⁶ dan cenderung pro-Belanda, tapi masih ingin mempertahankan identitas ke Tionghoannya (Ahmad Kosasih, Vol 1, No. 1, 2013: 43).

Pada 1 Juli 1906, beredar mingguan Seng Kie Po yang disusul dengan Sin Po pada tahun 1910 di Batavia. Sin Po menjadi salah satu surat kabar paling berpengaruh di Hindia Belanda. surat kabar Sin Po yang cenderung mendukung nasionalisme Tiongkok bukan berarti mengabaikan sepenuhnya perjuangan nasionalisme Indonesia. Mereka tetap menjalin hubungan baik dengan elit pergerakan bahkan tidaklah berlebihan kalau dikatakan mereka sangat bersimpati dengan nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Kwee Kek Beng dalam surat kabar Sin Po yang berisi:

Orang Tionghoa tidak bisa netral seperti bangsa lain karena jumlah Tionghoa banyak dan mereka akan ‘tetap tinggal di sini’. Bumiputera akan merdeka dan sebelum hal itu tercapai orang Tionghoa harus menunjang pergerakan tersebut. Di samping itu ‘Indonesier’ dan Tionghoa sama-sama bangsa Asia dan nasionalis Tionghoa wajib membantu pergerakan yang mulia itu (Kwee Kek Beng, Sin Po, 30 September 1926).

Kuatnya pengaruh PTHHK maupun STHHK dalam membentuk masyarakat Tionghoa terdidik dan kritis mengantarkan pemerintah Belanda pada

⁶ Chung Hwa Hui (CHH) adalah sebuah organisasi dan partai politik pro- Belanda konservatif di Hindia Belanda, yang didirikan tahun 1928 di negeri Belanda. CHH didirikan oleh para murid Tionghoa lulusan HCS, yang berhasil melanjutkan studinya ke negeri Belanda. CHH kerap mendapatkan kritik karena menjadi corong dari kalangan berkuasa Tionghoa kolonial.

jurang kekhawatiran. Realitas-realitas tersebut memaksa pemerintah kolonial untuk membuat sekolah tandingan bagi STHHK. Dalam nasihat kepada pemerintah tahun 28 Juni 1907, Dewan Hindia mengusulkan pendirian sekolah-sekolah Belanda untuk anak-anak Tionghoa di kota-kota yang mungkin diadakan. Oleh karenanya, dibentuklah sekolah Tionghoa ala Belanda, yang dikenal dengan HCS pada tahun 1908 di wilayah Meester Cornelis, Batavia.

Sekolah HCS merupakan sekolah tandingan untuk mengisi kebutuhan pendidikan etnis Tionghoa. Meski demikian, sekolah ini hanya dapat diakses oleh kalangan Tionghoa kaya. Untuk masuk dan mengikuti pendidikan di HCS terdapat proses seleksi yang didasarkan atas jabatan, asal keturunan, kekayaan atau pendidikan orang tua. Kriteria penghasilan atau kekayaan harus sebesar f.100/bulan (Sartono Kartodirjo, 1993: 218-219). HCS dirancang seperti *Europeesche Lagere School* (ELS) atau sekolah rendah Eropa/SD, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan tidak memberikan pelajaran bahasa Tionghoa ataupun kebudayaannya. Sama seperti sekolah-sekolah Belanda pada umumnya, kurikulum pengajaran menggunakan materi pengajaran ala Barat condong ke Belanda.

Tidak hanya pemerintah kolonial, kuatnya pengaruh dari eksistensi STHHK turut menginspirasi masyarakat Arab peranakan di Batavia untuk mendirikan organisasi serta pendidikan modern yang berorientasi pada budaya Arab dan agama Islam. Bersamaan dengan tahun berdirinya STHHK di Batavia pada tahun 1901, sebagai langkah permulaan beberapa tokoh masyarakat Arab turut berinisiatif mendirikan sebuah organisasi modern yang bergerak di bidang sosial pendidikan berdasarkan Islam sebagai tandingan THHK, yang diberi nama Jamiet Kheir (Perserikatan Bagi Kebaikan). Berdasarkan pengesahan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jamiet Kheir resmi didirikan pada 17 Juli 1905 di Batavia dan menjadi organisasi modern Islam pertama di Hindia Belanda. Namun, Jamiat Kheir dilarang oleh pemerintah Belanda untuk mendirikan cabang-cabang organisasi di luar wilayah Batavia. Para pengurus Jamiet Kheir menganjurkan umat Islam agar mengombinasikan kemajuan ilmiah pembelajaran Barat dengan agama Islam yang dimurnikan (Susan Blackburn, 2011: 151; Mansur dan Mahfud Junedi,

2005; 65).

Sementara dari segi budaya, PTHHK dan STHHK mempengaruhi cara pandang kalangan Tionghoa dalam menyikapi budaya perkawinan dan kematian menjadi dampak paling terlihat. Pada 22 Oktober 1900, para pengurus PTHHK membagi tugas kepada tiga orang anggota untuk melakukan peninjauan lebih jauh terhadap budaya buruk upacara kematian dan perkawinan kalangan Tionghoa di Batavia. Pasca 5 bulan berdirinya STHHK di Batavia, para pengurus PTHHK maupun STHHK kembali gencar memusatkan perhatiannya pada upacara kematian dan pernikahan. Pada 5 Agustus 1901, pertemuan dewan kembali diadakan untuk membicarakan soal pembuatan hikayat “Merayakan Hal Kawinan”. Di samping itu, dibentuk satu komisi lain yang bertugas mengurus hikayat “Merawat Hal Kematian”. Anggota terdiri dari Nie Liang Soey, Khoe Siau Eng, Oey Koen Ie, Tjoe Siau Hoei, dan Lie Kim Hok. Cara-cara tersebut dianggap akan memberikan pengaruh lebih efektif mengingat banyaknya kalangan Tionghoa yang memiliki minat khusus dalam dunia sastra. Tugas kedua komisi tersebut sudah diatur persediannya oleh Letan Keng Djian di Pemalang dalam surat tertanggal pada 5 Juli 1902. Dalam surat tersebut, THHK meminta agar aturan-aturan soal upacara perkawinan dan kematian, yang telah mereka susun dalam sebuah hikayat segera diresmikan (Mahfud Junedi, 2005; 25-29).

KESIMPULAN

Sejak Hindia Belanda masih di bawah kepemimpinan VOC, penduduk Tionghoa sudah mendapatkan kebijakan-kebijakan rasial seperti kebijakan *Permissie briefe* (surat izin tinggal) hingga dokumen lisensi (*licentie briefje*) bagi masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal tiga bulan untuk urusan niaga mulai diterapkan pada tahun 1727. Kalangan Tionghoa di tempatkan di luar kawasan tembok Batavia yang dikenal dengan Kampung Pecinan. Kebijakan diskriminatif ini semakin diperketat dengan adanya aturan Pas Jalan (*Passenstelsel*) pada tahun 1816 dan Sistem Pemukiman (*Wijkenstelsel*) pada tahun 1866.

Tidak hanya menyoal kebijakan penduduk, tetapi bidang pendidikan turut dipecah sesuai etnisitas: masyarakat Eropa pada garis teratas; Timur Asing berada

pada garis kedua; Bumiputera menempati garis terbawah. Akan tetapi pada eksekusinya, kalangan Tionghoa dan masyarakat Timur Asing lainnya tidak pernah mendapat perhatian layak dalam bidang pendidikan selain golongan mereka sendiri yang memperjuangkannya.

Sekolah Tionghoa yang cukup terkenal sebelum abad ke-20, yaitu Sekolah Gie Oh. Gie Oh didirikan di Petak Sembilan, Batavia sekitar tahun 1787. Namun, karena sistem pengajaran yang masih begitu tradisionial, Sekolah Gie Oh sangat sulit berkembang dan bersaing. Dalam perkembangannya, konsep stratifikasi sosial pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan justru menjadi salah satu pemicu adanya keinginan kalangan Tionghoa untuk merdeka di atas kaki mereka sendiri dan lepas dari kendali Belanda. Munculnya nasionalisme Tionghoa ditandai dengan lahirnya sebuah Perkumpulan PTHHK pada 17 Maret 1900 di Patekoan, Batavia.

Awal berdirinya PTHHK bertujuan untuk mereformasi budaya buruk kalangan Tionghoa dalam upacara perkawinan dan kematian, serta menyebarkan ajaran Konfusius. Namun, dengan masuknya pengaruh totok yang simpatisan terhadap gerakan revolusioner di daratan Tiongkok, pergerakan Tionghoa di Jawa turut bercorak politik termasuk PTHHK. Perkembangan pesat PTHHK tidak hanya berhenti pada urusan budaya dan politik melainkan gagasan untuk mendirikan Sekolah Tionghoa turut muncul di permukaan.

Pada 17 Maret 1901, Sekolah STHHK berhasil didirikan di Jl. Patekoan, Batavia, sebagai sekolah etnis Tionghoa modern pertama di Hindia Belanda. Sistem pengajaran STHHK banyak mengadopsi dari sistem modern dari sekolah Tionghoa di Jepang dan Tiongkok. Kurikulum dalam sistem modern yang digunakan STHHK di disebut sistem "*practisch*", yakni tidak adanya lagi sistem menghapalkan kitab-kitab tradisional Tiongkok seperti sistem sekolah tradisional Tionghoa. Pelajaran-pelajaran yang diberikan berupa ilmu pengetahuan modern seperti pelajaran berhitung, geografi, sejarah, ilmu alam, membaca, menulis, tak terkecuali pelajaran tentang Konfusianisme dan bahasa *Tjing-Im* (bahasa Mandarin). Para guru atau pengajar banyak didatangkan dari Tiongkok, sedangkan para murid didominasi oleh kalangan Tionghoa peranakan.

Pesatnya perkembangan pemikiran penduduk Tionghoa lari jauh dari ekspektasi Belanda bahkan tidak pernah disangka sebelumnya. Sebagai upaya mengatasinya, pemerintah kolonial mendirikan HCS, sebagai sekolah saingan STHHK pada tahun 1908 di Batavia. Sekolah ini sepenuhnya menerapkan sistem pendidikan Barat dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya.

Tidak hanya pihak Belanda yang berhasil terpengaruh dengan kemunculan THHK, penduduk Arab di Batavia turut merasakan dampaknya. Bersamaan dengan tahun berdirinya STHHK di Batavia pada tahun 1901, sebagai langkah permulaan beberapa tokoh masyarakat Arab berinisiatif mendirikan sebuah organisasi modern yang bergerak di bidang sosial pendidikan berdasarkan Islam sebagai tandingan THHK, yang diberi nama *Jamiet Kheir* (Perserikatan Bagi Kebaikan). Berdasarkan pengesahan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, *Jamiet Kheir* resmi didirikan pada 17 Juli 1905 di Batavia, dan menjadi organisasi modern Islam pertama di Hindia Belanda.

Selain dari bidang sosial dan politik, kemunculan THHK di Batavia turut mempengaruhi kalangan Tionghoa itu sendiri dalam bidang budaya, yakni dalam menyikapi upacara perkawinan dan kematian. THHK menjadi patokan kalangan Tionghoa di Hindia Belanda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar upacara pernikahan dan kematian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu menunjukkan adanya kesadaran kalangan Tionghoa terhadap budaya mereka yang keliru dan tertarik untuk memperbaikinya berdasarkan ajaran Konghuchu serta budaya etnis Tionghoa di tanah leluhur mereka. Pada tahun 1942, setelah tentara Jepang berhasil memukul mundur kolonialisme Belanda dan mulai mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda, seluruh STHHK di Batavia ditutup dan diubah menjadi markas internir untuk tawanan perang dan pos penjagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Kwee Kek Beng, "Kedudukan Orang Tionghoa", Sin Po, 30 September 1926.

Kwee Tek Hoay, "Atsal Moelahnja terbit Pergerakan Tionghoa jang modern di Indonesia", No. IV, Moestika Romans, Januari 1937.

Lim Khim Siang, “Moerid T.H.H.K. Batavia Berladjar ka ‘Nang King”, *Ik Po*, No.150/3, 22 Januari 1907.

Buku dan Jurnal

Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

Ahmad Kosasih, “Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia, 1900-1942”, *dalam Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Anonim, *Buku Peringatan 110 tahun Sekolah THHK–Pahoa Jakarta*, Jakarta: Perkumpulan Pancaran Hidup, 2011.

Benny G. Setiono, *Tiong Hoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Transmedia, 2008.

Blackburn, Susan, *Jakarta Sejarah 400 Tahun*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Dien Madjid, Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2014.

Iyus Jayusman, Miftahul Habib Fachrurozi, “Eksistensi Kaum Tionghoa dalam Dunia Pers di Hindia Belanda Tahun 1869-1942”, *dalam Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Kristan dan Sugiaman Gonassis, *Sejarah Agama Konghucu Indonesia: Tiong Hoa Hwee Koan*, Jakarta: Yayasan Barcode, 2020.

Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

Noer Isnaeni, “Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru di Indonesia”, *ABA BSI*, Jakarta: Akademi Bahasa Asing Bina Sarana Informatika, tt.

Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Depok: Komunitas Bambu, 2009.

Ririn Darini, “Kebijakan Negara dan Sentimen Anti Cina: Perspektif Historis, *dalam Istorica* Vol 7 No. 1, 2009.

Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.

Yerry Wirawan, *Keberagaman Masyarakat Indonesia: Pengantar Sejarah dan*

Penelitian Masyarakat Tionghoa di Nusantara, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2018.